

## Analisis Bantuan Keuangan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Jombang

Erna Zuroida<sup>1</sup>, Muchtar<sup>2</sup>, Supriyanto<sup>3</sup>, Sayekti Suindyah Dwiningwarni<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Darul Ulum, Jombang  
ernazuroida@gmail.com<sup>1</sup>, muchtar.210959@gmail.com<sup>2</sup>, supriyantoaji67@gmail.com<sup>3</sup>  
sayekti.undar67@gmail.com<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa serta kendala yang ada dalam pemanfaatan dana desa di Kabupaten Jombang, dimana terpilih empat desa mewakili nilai dengan peringkat dua teratas dan dua terbawah dari masing-masing kategori desa berdasarkan Rekapitulasi IDM tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis Milles dan Huberman melalui angket, interviu, observasi dan studi dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa tahun 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan program Dana Desa di Desa Losari, Desa Madiopuro dan Desa Plandaan Kabupaten Jombang pada tahun 2015-2017, telah mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta keterlibatan masyarakat desa telah dikatakan efektif dan sudah cukup baik. Sedangkan pemanfaatan Dana Desa di Desa Carangwulung belum terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan belum melibatkan masyarakatnya dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan kegiatan. Adapun kendala-kendalanya adalah lambatnya pencairan dari RKUD ke RKD diantaranya akibat perubahan regulasi, masih kurangnya kapasitas kelembagaan dan SDM, serta Desa Carangwulung merasa anggaran Dana Desa masih kurang sesuai dengan besarnya pembangunan desa.

**Kata kunci:** Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa, IDM, Akuntabilitas.

### ABSTRACT

This study aims to describe the use of Village Funds in village development. Village development is an effort to improve the quality of life and life for the maximum welfare of rural communities as well as the obstacles that exist in the utilization of village funds in Jombang, where four villages are selected representing the top two and bottom two values of each village category based on IDM Recapitulation 2017. This study used a descriptive qualitative approach with the Milles and Huberman analysis method through questionnaires, interviews, observations and documentation studies of the 2015-2017 Village Fund Budget Realization Report. The results showed that the use of the Village Fund program in Losari Village, Madiopuro Village and Plandaan Village, Jombang Regency in 2015-2017, has been able to improve the welfare and quality of life of the community and the involvement of village communities has been said to be effective and quite good. While the use of Village Funds in Carangwulung Village has not been proven to be able to improve the welfare and quality of life of the community and has not involved the community in the preparation of development plans to the implementation of activities. The obstacles are the slow disbursement from the RKUD to the RKD, among others due to changes in regulations, the lack of institutional capacity and human resources, and the Carangwulung Village feel that the Village Fund's budget is still not in line with the size of the village development.

Keywords: Village Financial Management, Village Funds, IDM, Accountability.

## I. PENDAHULUAN

Kewenangan otonomi daerah yang diberikan kepada kabupaten/kota dan desa merupakan strategi ekonomi agar dapat menumbuhkan potensi daerah dan menciptakan pemerataan pembangunan, sebagaimana tujuan pembangunan nasional, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan dalam otonomi daerah harus dimulai dari desa sebagaimana dijelaskan dalam UU nomor 6 tahun 2014, bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implikasi dari penyelenggaraan pembangunan desa berdasarkan sistem desentralisasi secara ekonomi, Pemerintah meluncurkan Dana Desa yang semakin meningkat setiap tahunnya sebagai salah satu sumber dana dalam memberikan pelayanan, pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih berkembang dan berdaya (mandiri) agar dapat menggali dan mendapatkan potensi pendapatan sendiri sebagai modal pembangunan desa.

Pembangunan desa sebagaimana dijelaskan dalam Permendes nomor 5 tahun 2015, adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan pedesaan merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif, yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan tersebut.

Pembangunan perdesaan harus dilaksanakan sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan perdesaan yang telah ditetapkan. Peningkatan pembangunan desa dilaksanakan melalui pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar bertujuan untuk

pembangunan kawasan perdesaan dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan.

Sejauhmana keberhasilan pembangunan suatu desa dapat menghasilkan materi dan didistribusikan secara adil diantara masyarakatnya, tercermin dari peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan digulirkannya dana desa, diharapkan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Indikator keberhasilan pelaksanaan Dana Desa antara lain:

- 1) Dana Desa diharapkan berpengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian Desa, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status Desa dalam Indeks Desa Membangun.
- 2) Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, yang meliputi: *pertama*, yaitu peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa (Todaro dan Stephen C. Smith, 2006).

Keberhasilan pembangunan suatu desa dilihat dari bagaimana kemampuan desa dalam memberdayakan masyarakatnya agar dapat berkontribusi memberikan dukungan dan partisipasi aktif sebagai subyek pembangunan sehingga dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama serta terciptanya masyarakat yang lebih berdaya (mandiri).

Beberapa hasil penelitian terkait kontribusi program Dana Desa diantaranya dilakukan oleh Feiby Vencentia Tangkumahat et. all (2017) yang menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Demikian juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Risma Hafid (2017) yang menunjukkan bukti program Dana Desa berjalan efektif dengan realisasi jumlah program-program pembangunan yang sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang sebagai salah satu sarana menyalurkan aspirasi dan keterlibatan masyarakat. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif Sofianto (2017) yang menunjukkan adanya peningkatan aksesibilitas masyarakat desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Serta hasil penelitian yang dilakukan oleh Tisha Alya Arifiani (2017) yang menunjukkan adanya kecenderungan sikap positif masyarakat yang mengikuti musyawarah desa dan tingkat partisipasinya tinggi yang mempengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kendatipun demikian, banyak kelemahan yang muncul ketika dana desa dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan, salah satunya sebagai akibat tidak adanya/kurangnya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat seperti penggunaannya tidak tepat sasaran atau pembangunan desa belum optimal dilaksanakan sesuai usulan masyarakat serta kurangnya kemampuan dan pemahaman para aktor pengelola dana.

Di sisi lain, banyaknya jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bantuan keuangan desa diantaranya dana desa, secara tidak langsung menjadikan pengawasan dari pemerintah pun kurang optimal. Peningkatan jumlah dana bantuan keuangan yang telah diterima oleh 302 desa di Kabupaten Jombang seharusnya memiliki peranan yang besar dalam menunjang pembangunan desa sehingga program kegiatan pembangunan fisik seharusnya menjadi lebih banyak, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan

penyerapan tenaga kerja baik pada pekerjaan fisik maupun non fisik berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena itulah peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang sejauh mana bantuan keuangan dana desa dapat dimanfaatkan dalam pembangunan desa di Kabupaten Jombang serta kendala yang ada dalam pemanfaatan dana desa.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data informasi secara mendalam mengenai pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan desa di Kabupaten Jombang serta kendala-kendalanya. Dengan sumber data menggunakan dokumen dan informasi penunjang berupa peraturan dan segala hal yang berkaitan dengan dana desa, yaitu angket kuisioner dan interviu kepada kepala desa, aparatur pemerintah desa dan masyarakat; observasi serta dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa tahun 2015-2017. Serta teknik analisis data deskriptif kualitatif menggunakan metode analisis Milles dan Huberman dalam Sugiono (2009) yang meliputi: pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## III. PEMBAHASAN

### 1. Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Jombang dan Kendalanya

Penelitian ini memilih empat desa di Kabupaten Jombang, yaitu desa Losari, desa Madiopuro, desa Plandaan dan desa Carangwulung. Penentuan desa yang mewakili kategori masing-masing status desa berdasarkan perolehan peringkat desa, yaitu peringkat dua teratas (dari kategori desa maju dan berkembang) dan peringkat dua terbawah (dari kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal) terpilih dari 302 desa di Kabupaten Jombang, dalam nilai Indeks Desa Membangun tahun 2017 dari hasil pendataan tahun 2018.

Indeks Desa Membangun (IDM) memotret perkembangan kemandirian desa dalam kerangka kerja pembangunan yang berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi menjadi ukuran dalam peningkatan kesejahteraan kehidupan Desa dan masyarakatnya. Dari empat desa sampel penelitian, hanya desa Losari yang mengalami peningkatan kemandirian Desa dari IDM tahun 2016 sebesar 0,6297 dengan kategori sebagai Desa Berkembang menjadi sebesar 0,8141 dengan kategori sebagai Desa Maju dalam IDM tahun 2017. Desa Madiopuro mengalami peningkatan kemandirian Desa dari IDM pada tahun 2016 sebesar 0,6297 dengan kategori yang sama sebagai Desa Berkembang dalam IDM tahun 2017 menjadi sebesar 0,7068. Desa Plandaan mengalami penurunan kemandirian Desa dari IDM tahun 2016 sebesar 0,6297 dengan kategori sebagai Desa Berkembang menjadi sebesar 0,4929 dengan kategori sebagai Desa Tertinggal dalam IDM tahun 2017, sebagai akibat dari kesalahan pengisian “*tidak ada*” pada instrumen IDM “*ketersediaan listrik di desa*”.

Sedangkan desa Carangwulung mengalami penurunan yang signifikan pada kemandirian Desa dari IDM tahun 2016 sebesar 0,7349 dengan kategori sebagai Desa Maju merosot menjadi sebesar 0,4879 dengan kategori sebagai Desa Sangat Tertinggal dalam IDM tahun 2017, yang tidak sebanding dengan banyaknya potensi ekonomi lokal berbasis kekayaan alam yang ada. Tidak adanya peningkatan secara riil maupun potensi PADes dalam APBDes 2015-2017 yang sangat kecil akibat belum di PERDES\_kannya retribusi desa setelah sekian lama beroperasi. Pemerintah Desa Carangwulung terlalu menggantungkan pembiayaan pembangunan desa pada bantuan

pemerintah yang diindikasikan adanya “kesengajaan” dalam rangka meningkatkan perolehan Dana Desa dan dana bantuan keuangan lainnya dari pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Losari, Desa Madiopuro dan Desa Plandaan, telah mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, saluran irigasi dan air bersih, jaringan internet, Polindes, Poskamling dan PAUD sebagai prioritas kebutuhan pembangunan desa yang sangat bermanfaat dalam memperlancar aktivitas masyarakat desa. Serta pemberdayaan masyarakat desa antara lain pelestarian lembaga seni tradisional, BUMDes, PKK, Karang Taruna, GSI, KPMD, Posyandu, Jumantik, Sambung Rasa, Bantuan Sosial, LPMD, Paralegal, Linmas dan FKDM.

Sedangkan penggunaan dana desa Carangwulung tahun 2015-2017 dilakukan secara tidak transparan dan tidak sesuai ketentuan, dana desa belum terbukti mampu memberi manfaat yang positif untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian desa. Secara umum belum terjadi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di desa Carangwulung. Antara apa yang diharapkan belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil yang terjadi.

## **2. Keterlibatan Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa**

Keterlibatan masyarakat dalam kontribusinya menjadi subjek pembangunan desa pada aspek: 1) perencanaan pembangunan yang disebut dengan musrenbang, 2) pelaksanaan kegiatan atau implementasi, dan 3) pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran Dana Desa, dapat berbentuk tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian di bidang tertentu.

Adanya ketidakpedulian dan rendahnya tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan desa mengindikasikan adanya ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan desa, bahkan adanya beberapa pertanyaan tentang penggunaan iuran kegiatan desa dikarenakan di sebagian masyarakat desa tidak mengetahui penggunaan dana desa serta tidak merasakan adanya perkembangan yang signifikan di desanya.

Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Losari, Desa Madiopuro dan Desa Plandaan Kabupaten Jombang telah dikatakan efektif dan sudah cukup baik, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya kegiatan pembangunan. Hal ini dapat dibuktikan dengan realisasi jumlah kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui Musrenbang. Sementara Desa Carangwulung belum melibatkan masyarakatnya dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan kegiatan.

Prinsip transparansi, swakelola dan keadilan belum bisa sepenuhnya diterapkan dalam kegiatan pengelolaan dana desa, bisa jadi disebabkan masih jauhnya dari pengawasan instansi yang kompeten seperti BPK dan KPK, atau penyampaian informasi dari aparat desa ke masyarakat yang masih sangat kurang. Juga belum berlakunya punishment tidak dapat disalurkan karena dana desa jika persyaratan penyaluran tidak/kurang dapat dipenuhi, serta belum adanya reward atas keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Seiring sistem digitalisasi di era globalisasi ini, pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, dengan memanfaatkan jaringan internet agar

masyarakat desa dapat mengakses pelayanan dan informasi kegiatan pembangunan desa secara online dalam rangka ikut terlibat secara aktif dan mengambil bagian untuk berkontribusi menjadi subjek atau pelaku dalam setiap tahap pembangunan desa sesuai dengan kemampuannya.

Efektivitas peranan dan kebijakan pemerintah sangat diperlukan dalam mengelola alokasi sumber daya yang ada agar pembangunan dapat menghasilkan materi dan didistribusikan secara adil diantara masyarakatnya, yang tercermin dari peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Masalah-masalah kepemilikan aset yang terbatas, rendahnya mutu sumber daya manusia, lemahnya lembaga pemerintahan desa dan lembaga masyarakat desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, terbatasnya jangkauan pelayanan lembaga perekonomian dalam mendukung usaha ekonomi desa, dan belum meratanya sarana dan prasarana sosial ekonomi dalam melayani kebutuhan masyarakat desa.

Etika, kejujuran dan integritas, tanggung jawab, inovasi, kemauan keras, perencanaan yang matang dan tepat waktu serta menghormati aturan dan hukum masyarakat sebagai prinsip dasar kehidupan yang sangat diperlukan dalam membangun masyarakat, ekonomi dan negara. Para aktor pengelola dana-dana pembangunan, dalam hal ini dana desa terutama para kepala desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa yang tepat sasaran dan efektif, bukan hanya memperjuangkan kepentingan pribadi, keluarga ataupun hak pilihnya sebagai "rasa terima kasih".

#### IV. PENUTUP

##### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Losari, Desa Madiopuro dan Desa Plandaan Tahun 2015-2017, telah mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, terlihat dari pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, saluran irigasi dan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat yang sangat bermanfaat dalam memperlancar aktivitas masyarakat desa; serta keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa telah dikatakan efektif, dapat dibuktikan dengan realisasi jumlah kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui Musrenbang. Sedangkan di Desa Carangwulung dana desa belum terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di desa Carangwulung. Adanya penurunan perolehan nilai ataupun status desa dalam Indeks Desa Membangun sebagai akibat *kesalahan pengisian* pada instrumen IDM serta diindikasikan "kesengajaan" dalam rangka meningkatkan perolehan Dana Desa dan dana bantuan lainnya dari pemerintah pusat.

Kendala-kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Lambatnya pencairan dari RKUD ke RKD yang menghambat pelaksanaan pembangunan, diantaranya akibat perubahan regulasi.
2. Masih kurangnya kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur pemerintah, perangkat desa, tenaga pendamping desa dan masyarakat.
3. Walaupun anggaran Dana Desa cukup besar, tetapi desa Carangwulung mengeluarkan masih kurang sesuai dengan besarnya pembangunan desa.

Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Losari, Desa Madiopuro dan Desa Plandaan Kabupaten Jombang sudah cukup baik, walaupun

tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya kegiatan pembangunan. Sedangkan Desa Carangwulung belum melibatkan masyarakatnya dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan kegiatan.

## 2. Saran

- a. Mengadakan sosialisasi penyebaran informasi dan pemahaman program pembangunan agar masyarakat dapat terlibat dan ikut mengawasi jalannya pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Desa sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pelaksana Dana Desa melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya tentang pengelolaan keuangan desa.

## REFERENSI

- Arifiani, Tisha Alya, 2017. Analisis Respon Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Pedesaan (Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang).  
Agus Nazaruddin, Muhammad Mudjib Musta'in, & Humaidah Muafiqie. (2017). Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Jombang. *Journal of Public Power*, 1(1), 17-39.  
Denis Setiawan, Muchtar, & Humaidah Muafiqie. (2017). Faktor-Faktor Determinan yang Berpengaruh Pada Tingkat Pengangguran Di Indonesia Periode 2000-2016. *Journal of Public Power*, 1(1), 1-16.  
Dewi Ambarwati, Muhammad Mudjib Musta'in, Supriyadi, & Sayekti Suindyah Dwiningwarni. (2017). Pengaruh Penyaluran Dana Koperasi Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota Kepontren Sunan Bonang Pondok Pesantren Parengan-Tuban. *Journal of Public Power*, 1(1), 57-66.  
Edi Agus Santoso, Humaidah Muafiqie, & Junaedi. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Jumlah pengambilan kredit pada nasabah PD BPR Bank Pasar Kabupaten Lamongan. *Journal of Public Power*, 1(2), 67-74.  
Himawati, E. R. K., Junaedi, Supriyanto, & Sayekti Suindyah Dwiningwarni. (2017). Analisis Program Keluarga Harapan Terhadap Pendapatan Keluarga SMK Kesehatan Bhakti Indonesia Medika Kota Mojokerto. *Journal of Public Power*, 1(1), 40-45.  
Samiran, Muchtar, Junaedi, & Sayekti Suindyah Dwiningwarni. (2017). Peranan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Journal of Public Power*, 1(1), 46-56.  
Nunik Maftuchah, Muchtar, & Humaidah Muafiqie. (2017). Pengaruh Modal Usaha, Tenaga Kerja Dan Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Produksi Genteng Di Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan . *Journal of Public Power*, 1(2), 75-86.

- Heni Siswati, Nersiwad, Supriyanto, & Sayekti Suindyah Dwiningwarni. (2017). Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan. *Journal of Public Power*, 1(2), 87-96.
- Siti Rif'atin Nuriyah, Humaidah Muafiqie, & Junaedi. (2017). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Bojonegoro. *Journal of Public Power*, 1(2), 97-109.
- Syahrul Mubarak, Junaedi, Supriyanto, & Sayekti Suindyah Dwiningwarni. (2017). Pengaruh Penggunaan Modal Usaha Sendiri Dan Modal Kredit Dari Bank BRI Unit Babat Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Babat Kabupaten Lamongan. *Journal of Public Power*, 1(2), 110-122.
- Hafid, Risma. 2016. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017, Buku Pintar Dana Desa. *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*.
- Sofianto, Arif. 2017. Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan.
- Tangkumahat, Feiby Vencentia et. all. 2017. Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.
- Todaro, Michael P and Stephen C.Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan, Jilid I. Erlangga, Jakarta.